

ABSTRAK

Desa Banyoneng Laok Kecamatan Geger adalah salah satu wilayah di kabupaten Bangkalan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pekerja migran. Dalam bekerja sebagai pekerja migran seringkali masyarakat berangkat tidak prosedural dan melanggar hukum seperti berangkat secara ilegal dan memiliki dua kewarganegaraan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya mengatur mengenai kewarganegaraan ganda terbatas yaitu sampai usia 18 tahun atau belum kawin. Permasalahan dalam skripsi yaitu: (1) Apa faktor penyebab pekerja migran Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda? (2) Bagaimana pengaturan kewarganegaraan ganda di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Hasil penelitian ini penyebab pekerja migran memiliki kewarganegaraan ganda diantaranya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pernikahan campuran, penerapan asas kewarganegaraan yang berbeda, dan pewarganegaraan dari negara lain. Adapun upaya pemerintah dalam menangani kewarganegaraan ganda adalah dengan sosialisasi dan pencabutan kewarganegaraan.

Kata kunci: kewarganegaraan ganda, pekerja migran, pemerintah

ABSTRACT

Banyoneng Laok Village, Geger District, is one of the areas in Bangkalan Regency where the majority of the population works as migrant workers. When working as migrant workers, people often leave without procedures and violate the law, such as leaving illegally and having dual citizenship. Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia only regulates limited dual citizenship, namely up to the age of 18 years or being unmarried. The problems in this thesis are: (1) What are the factors that cause Indonesian migrant workers to have dual citizenship? (2) How is dual citizenship regulated in Indonesia?

The research method used is empirical juridical. This research uses a legal sociology approach.

The results of this research are the reasons why migrant workers have dual citizenship due to several factors, namely mixed marriages, the application of different citizenship principles, and citizenship from another country. The government's efforts to deal with dual citizenship include outreach and revocation of citizenship.

Key words: dual citizenship, migrant workers, government